

Peran Media Massa Terhadap Perubahan Kebijakan Perancis. Kasus: Paris Attack 2015

Gilang Dhuhuriawan Ferarto

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : gilangdhuhuriawan@outlook.com

Abstract

This research associate of causality between France mass media with the French policy change post Paris Attack 2015. Problem in descriptive research with qualitative analysis is how the role of mass media coverage during Paris Attack, so that it can change some policy of France. Theory on this research such as media and terrorism concept, CNN effect theory, policy influence change in foreign policy. Hypothesis in principle to find the relationship between the role of the mass media with France policy change. Conclusion of this research is the author agreed with what the author's source say, that the media does have an influence in a country's policy change, however is not the only factor that affect the policy change in France. There are other actors such as the party, the Government and the Ally that affect a country's policies.

Kata Kunci: *Paris Attack, Policy Change, Mass Media, Terrorism, State Actor.*

Pendahuluan

Jumat, 13 November 2015 adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Perancis, karena pada hari itu serangan teror yang terjadi di Paris telah menewaskan 128 korban jiwa (Almasy *et al*, 2015). Teroris telah merencanakan hal ini dengan sangat matang, karena pada hari itu berdekatan juga dengan hari penting lainnya yang juga diselenggarakan oleh Perancis antara lain bom tersebut diledakkan bersamaan dengan pertandingan sepak bola antara Perancis dan Jerman. Minggu, 15 November 2015 adalah hari dimana terdapat Konferensi G-20 di Turki menjadikan agenda konferensi tersebut menjadi serangan teror di Paris. Senin tanggal 30 November 2015 Perancis menjadi tuan rumah UN *Climate Talks* (Brumfield *et al*, 2015). Dan tanggal 10 Juni 2016 seperti yang kita tahu adalah perhelatan UEFA Euro 2016 di Perancis.

Berdasarkan penjelasan mengenai kejadian tersebut, Pemerintah Perancis

melihat bahwa salah satu faktor mengapa kejadian ini terjadi adalah kurangnya pengamanan dan pengawasan terkait perbatasan maupun masuknya arus pengungsi. Terkait pengungsi, Sebelum serangan Paris 13 November terjadi, Pemerintah Perancis memberikan ruang kepada para pengungsi untuk mencari tempat suaka di Perancis dengan jumlah yang sangat banyak, menurut laporan Eurostat, sepanjang Januari hingga September 2015, jumlah pemohon pengungsi ke Perancis berjumlah 50.840. Dari jumlah tersebut terdapat pula pengungsi dengan status *pending* dengan jumlah 34.490 dan dengan status *rejection* sebanyak 41.595. Dari jumlah ini bisa dilihat bahwa Perancis merupakan negara yang memberikan ruang bagi pengungsi. Akan tetapi Eurostat juga memberikan laporan bahwa angka penolakan terhadap pengungsi untuk masuk Perancis mencapai 74,1 Persen. Artinya di satu sisi Perancis membuka lebar pintu masuk pengungsi, dan disisi lain juga menolak pengungsi. Dengan

kata lain keterbukaan perancis ini diiringi dengan sikap kewaspadaan akan hadirnya pengungsi yang akan membahayakan keamanan nasional. Pasca serangan teror 13 November 2015, Pemerintah Perancis merespon dengan mengeluarkan kebijakan baru berkaitan dengan pengungsi. Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan melalui *The Guardians* (2015) bahwa Perancis akan melakukan pengetatan pengungsi dari Timur Tengah khususnya dari Irak dan Suriah hanya sebanyak 30.000 pengungsi yang akan dimasukkan selama dua tahun (2016-2017). Angka ini tentu saja menyusut hingga 15.000 pengungsi dibandingkan dengan data yang dilaporkan Eurostat.

Beberapa negara terutama yang menganut sistem demokrasi, begitu mengagungkan media sehingga media diperlakukan sebagai "the fourth estate" setelah badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini berarti media memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan politik suatu negara, baik itu domestic maupun luar negeri. Media, dalam hal ini yang menghasilkan opini publik, memberikan pengaruhnya bagi perumusan kebijakan. Hal ini dikarenakan media merupakan alat untuk mengekspresikan interpretasi dan ekspektasi dari entitas non-pemerintah dan juga alat untuk mengekspresikan dan menyebarkan suatu kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah (Naveh, 2002: 2)

Keberadaan media massa dalam aktivitas persebaran informasi terhadap terorisme kemudian muncul. Satu anggapan mengatakan bahwa terorisme dan media massa mempunyai kepentingan yang sama dimana media massa menempatkan kepentingannya pada kegiatan kelompok teroris. Di sisi lain, kelompok teroris menyusun strategi untuk menebarkan aksi mereka sehingga media yang meliput akan memunculkan efek luar biasa yang

disebabkan oleh teroris tersebut (Behm, 1991: 239-241). Dalam level ini, teroris tidak hanya dipandang sebagai kelompok kekerasan saja, namun lebih dari itu yaitu kelompok yang mencampurkan antara kekerasan dan propaganda sebagai aksi mereka yang diliput media (Sctrmid dan de Graaf, 1982: 14). Sisi positif dari media yang meliput hal tersebut adalah pemberitaan terorisme ke media massa dianggap mampu untuk memicu kebencian publik terhadap terorisme, dan terbuka pula kerja sama antara pemerintah dan media massa untuk menyusun strategi perang terhadap terorisme (Behm, 1991: 247-242).

Beberapa negara terutama yang menganut sistem demokrasi, begitu mengagungkan media sehingga media diperlakukan sebagai "the fourth estate" setelah badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kelompok teroris sering mengusung sensasi sebagai nilai berita yang mereka inginkan hingga dimuat dalam media massa dengan tujuan propaganda. Lebih lanjut media massa menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mendapatkan gambar-gambar menarik dan berita-berita mengenai penderitaan korban hingga mencekamnya suasana ledakan sebagai bentuk persaingan terhadap kompetitornya, media menganggap bahwa semakin berita tersebut mengejutkan semakin menarik untuk dibaca oleh publik, sehingga secara tidak langsung akan membuat media tersebut mengungguli kompetitornya (Giessman, 2002: 134-136). Padahal idealnya menurut Giessman (2002), media massa mempunyai kesempatan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk membatasi persebaran berita dan lebih mengedepankan kesadaran moral.

Reaksi media massa begitu masif pasca kejadian serangan di beberapa tempat di Paris pada 13 November 2015 lalu yang menyebabkan ratusan korban meninggal dan mengalami luka-luk. Tidak sedikit dari pengguna media sosial yang bereaksi dengan menyatakan bela

sungkawa dengan cara masing-masing atas kejadian ini dan mengutuk pelaku teror. Mark Zuckerberg, *founder* Facebook sampai menyediakan fitur untuk berbelasungkawa dengan memberikan layar setiap pengguna Facebook dengan layar bendera Perancis. Kabar yang berkicau di Twitter pun tidak mau kalah, kasus terror ini menjadi *trending topic* menggunakan *tagline* #PrayforParis di seluruh dunia pengguna media sosial ini hingga beberapa pekan di bulan November. Disamping itu, media-media internasional banyak yang melakukan pemberitaan secara global mengenai segala hal yang berkaitan dengan aksi teror ini. Harian Perancis, *Le Parisien*, mengutip sebuah judul utama di headline utamanya L'horreur yang artinya ketakutan. Terdapat pula ulasan menarik lainnya yang berjudul, "cette fois c'est la guerre", yang artinya untuk kali ini, ini adalah perang. Media internasional lain seperti *New York Times*, *Daily News*, *The Mail*, *Le Depeche*, *The Sun* dan masih banyak lagi juga tidak mau luput ambil bagian dalam memberitakan kasus terror ini.

Perancis mempunyai beberapa media massa yang sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam negeri, bahkan menjadi referensi bagi dunia Internasional. Menurut Statista (2015), data masyarakat Perancis pada kejadian tersebut berlangsung melihat berita adalah sebanyak 87 persen menonton televisi dan mengakses internet secara bersamaan. Hal tersebut menunjukkan banyak masyarakat yang menggunakan media massa sebagai sumber mereka mengetahui kejadian secara langsung dan berkelanjutan. Pola konsumsi masyarakat terhadap media di Perancis juga ditunjukkan oleh OJD France (2015) yang mengatakan bahwa *Le Monde*, *Le Parisien*, *Le Figaro* dan

Liberation menjadi media yang paling banyak dilihat oleh masyarakat. Penulis akan menggunakan data dari media yang paling berpengaruh di Perancis tersebut untuk menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kejadian *Paris Attack* tersebut.

Pemberitaan Media Massa Dalam Serangan Perancis Sebagai Pembentuk Opini Publik

Peran media massa dalam massa krisis dijelaskan secara khusus oleh Doris Graber. Krisis disini dapat terjadi di dalam maupun luar negeri, terutama yang melibatkan negara asal media tersebut, selama kejadian dalam hal ini adalah *Paris Attack*, publik bergantung sepenuhnya oleh pemberitaan media massa untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di tempat kejadian. Hal ini dikarenakan media adalah institusi yang memiliki instrument dan perlengkapan khusus untuk mengumpulkan informasi dan menyebarkan dengan cepat, terutama di era digital seperti sekarang ini dimana akses masyarakat dimudahkan untuk mengetahui berita secara langsung dan *online*. Ketika terjadi krisis yang perlu diwaspadai, mereka akan memantau perkembangan setiap saat, bila perlu mereka

Pola konsumsi masyarakat terhadap media di Perancis juga ditunjukkan oleh OJD France (2015) yang mengatakan bahwa *Le Monde*, *Le Parisien*, *Le Figaro* dan *Liberation* menjadi media yang paling banyak dilihat oleh masyarakat.

menyalakan televisi atau mengakses internet sepanjang hari (Graber, 2000: 140). Kejadian pada tanggal 13 November 2015 menimbulkan banyak simpati dari masyarakat lokal bahkan internasional, dan tampaknya aktor dibalik pengeboman Bataclan tersebut tahu bagaimana memanfaatkan situasi, karena banyak agenda penting yang sedang maupun akan terjadi. Secara langsung, aksi penyerangan Paris tersebut telah menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kekhawatiran secara langsung, karena di hari-hari setelah penyerangan tersebut terdapat berbagai macam acara yang dihadiri oleh kepala-

kepala negara. Terbukti setelah aksi penyerangan ini berlangsung, terdapat penggandaan pertahanan di negara Perancis dan Inggris (RT, 2015). Secara langsung, aksi teror tersebut tidak hanya semata-mata melakukan penyerangan di beberapa titik di Paris, namun juga membangun citra. Pertama, teror tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi, mereka sebenarnya benar-benar ada dan membahayakan publik, dibuktikan dengan serangan teror yang terjadi bertepatan dengan pertandingan persahabatan sepak bola antara Perancis dan Jerman yang berlangsung tidak jauh dari serangan, IS sebagai pihak yang mengakui serangan juga secara langsung menegaskan bahwa mereka ada.

Kedua, serangan IS di Paris sangat berdekatan dengan acara penting lainnya diantaranya UN Climate Talks yaitu tujuh hari, hal ini menimbulkan persepsi bahwa pengamanan di Perancis sangat lemah, karena tidak dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum konferensi tersebut diadakan. Apalagi UN Climate Talks tersebut dihadiri lebih dari 40.000 Peserta dari 195 Negara (Brumfield, et al., 2015). Hal ini mengharuskan Perancis memperketat keamanan domestik demi menjamin acara tersebut berlangsung lancar. Ketiga, dengan adanya pernyataan dari IS mengenai serangan yang dilatarbelakangi alasan bahwa Paris adalah pusat dari prostitusi dan dosa-dosa besar dari pandangan ajaran Islam (Sharma, 2015). Menjadikan tempat wisata di Paris harus ditutup sementara waktu dan ini mempengaruhi citra Paris di mata wisatawan dunia.

Beberapa media Perancis terkemuka dengan hasil peliputannya banyak memperoleh perhatian pembaca khususnya pada waktu serangan Paris ini berlangsung. Media internasional juga ikut terlibat disini untuk menarik perhatian internasional mengenai bagaimana serangan tersebut menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat di Paris. Media yang terkemuka di Perancis ini juga mempunyai banyak aliran dana dan

fasilitas lebih daripada media media yang tidak berpengaruh, selain pembentukannya sudah sejak lama, masyarakat Perancis juga semakin mudah untuk mengaksesnya dengan berlangganan, media massa seperti *Le Monde* dan *Le Parisien* mematok biaya satu Euro atau sekitar 14.500 Rupiah untuk satu bulan. Karena memiliki aliran dana dan fasilitas lebih daripada media-media lain, media *mainstream* di Paris ini kemudian menjadi sumber informasi bagi masyarakat Perancis untuk mengetahui seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan pasca bom tersebut diledakkan. Penulis mendapatkan data media *mainstream* mana saja yang banyak dibaca oleh masyarakat Perancis, yang kemudian menjadi landasan penulis untuk menyimpulkan seberapa berpengaruh media ini untuk menggerakkan opini publik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Perancis berganti

Ketika *Paris Attack* terjadi pada tanggal 13 November 2015.

Le Monde

Le Monde menjadi salah satu dari banyak media yang melakukan peliputan pada hari dimana masyarakat Paris berduka tersebut. dengan popularitas yang bagus, *Le Monde* secara langsung menginformasikan kepada pembaca melalui situs web milik *Le Monde* yaitu lemonde.fr pada tanggal 14 November 2015 pukul 00.14. pemberitaan *Le Monde* yang melihat dari sisi penderitaan masyarakat dengan gaya penulisan kata-kata yang ditebalkan, serta disertai dengan gambar dan video yang ditayangkan di satu per satu berita menambah kesan bahwa masyarakat Paris sangat menderita dengan kejadian tersebut. Penulis mengamati berita yang ditayangkan mulai dari tanggal 13 November atau hari kejadian yaitu pada hari jumat malam hingga 23 November.

Le Monde disebut-sebut sebagai pemimpin pasukan media untuk meliput kejadian dan penderitaan warga Perancis dan dunia atas kejadian

tersebut, Sylvie Kauffman, direktur editorial *Le Monde* mengatakan dalam *National Public Radio* yang berpusat di Amerika Serikat menyebutkan bahwa fokus yang harus dihadapi oleh pemerintah Perancis setelah kejadian pembunuhan di depan kantor majalah *Charlie Hebdo* dan Supermarket Kosher. Dia menambahkan bahwa pemerintah perancis harus melakukan pembicaraan langsung dengan masyarakat untuk mengatasi ketakutan akibat teror, karena jika masyarakat Perancis tertekan di situasi yang berlarut larut, maka akan berimbas pada kehidupan beragama mereka, karena Perancis adalah komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa, dan menurutnya masyarakat Perancis telah hidup damai dalam waktu yang lama (NPR, 2015). Sylvie Kauffman juga menambahkan bahwa media dapat mengurangi krisis bagi masyarakat selagi pemerintah belum melakukan perumusan kebijakan yang baru terkait Schengen. Karena terduga teroris adalah warga negara Belgia yang melakukan teror di Perancis, media seharusnya mendorong pemerintah untuk mencegah imigran bergerak bebas dari satu negara ke negara Eropa yang lain.

Le Monde menjadikan tajuk *La Terreur a Paris* sebagai berita utama dalam koran yang diterbitkan pada tanggal 14 November 2015. Dari tajuk ini dapat dilihat berbagai macam sudut yang ditunjukkan untuk memahami sejauh mana pengaruh pemberitaan *Le Monde*. Pertama, *Le Monde* memuat tentang Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang melakukan konferensi sebelum Presiden Francois Hollande melakukannya, isinya adalah tentang Amerika Serikat yang siap untuk mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah Perancis dan mengucapkan bela sungkawa terhadap masyarakat Paris serta mengutuk aksi teror yang merugikan banyak orang tersebut (*Le Monde*, 2015)

Kedua, *Le Monde* melaporkan tempat dimana saja letak serangan terjadi, mulai dari Stade de France tempat

diadakannya pertandingan persahabatan menuju Euro 2016 antara Jerman dengan Perancis, Le Bataclan, yaitu gedung pertunjukan teater yang terlatak di pusat kota Perancis, La Belle équipe, yaitu restoran yang berdekatan dengan bataclan. Ketiga, Akibat pengeboman yang terjadi pada Jumat malam, pada hari Sabtu seluruh fasilitas di kota seperti sekolah, museum, perpustakaan, tempat kebugaran olahraga, kolam renang dan restoran ditutup sementara, satu satunya yang dibuka adalah kantor pencatatan sipil di Perancis, ini berarti semua fasilitas di Perancis termasuk transportasi umum tidak berjalan, termasuk juga sekolah dan universitas yang ada di Perancis (*Le Monde*, 2015)

Kempat, Setelah Presiden Francois Hollande melakukan konferensi pers, mengumumkan bahwa Perancis dalam keadaan darurat, dan perlunya peningkatan keamanan dan kontrol perbatasan, yaitu penjagaan ketat jalur kereta api, penyeberangan laut dan bandara bagi warga yang hendak masuk ke negara Perancis. Ini dimaksudkan untuk membatasi gerak-gerik teroris yang akan keluar dari Perancis. *Le Monde* melaporkan bahwa ini sejalan dengan Perjanjian Schengen, pengamanan dapat dikembalikan atau dilakukan pengetatan jika negara dalam kondisi darurat. Pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah Perancis ini dapat berlangsung selama 24 bulan terhitung dari hari pertama adanya teror. Kelima, *Le Monde* menggunakan kata "Carnage" untuk menggambarkan seberapa parah tempat dan keadaan korban waktu terjadi penyerangan di Bataclan, dan untuk menambah efek dramatis (*Le Monde*, 2015)

Penulis mengumpulkan berita-berita yang keluar pada malam hari karena pada malam itu otoritas tertinggi negara Perancis mengeluarkan pernyataan terkait sikap atas kejadian, bahkan Presiden Barrack Obama juga tidak luput dari kejaran pers. Gambar-gambar yang ditayangkan oleh *Le Monde* juga membantu untuk menimbulkan efek

“mengerikan” yang terjadi selama serangan berlangsung. *Le Monde* meliput berita dari sisi lain pada siang harinya, jika pada dini hari *Le Monde* melaporkan mengenai tempat kejadian, Presiden yang berbicara hingga fasilitas publik yang akan ditutup pada hari sabtu. Maka siang hari *Le Monde* meliput penderitaan orang yang berada di tempat kejadian, beberapa berita dipaparkan penulis sebagai berikut: Pertama, Pada tanggal 14 November 2015 pukul 10 pagi waktu Perancis, *Le Monde* menerbitkan judul pada halaman web mereka berita yang berjudul “Tonight, The City Too, They Killed Her”. Isi beritanya adalah mengenai banyaknya orang yang keluar dari gedung teater tersebut setelah aksi penyerangan berlangsung, dengan gaya pemberitaan yang dramatis dan mencekam, serta gambar polisi dan korban yang dibawa oleh mobil ambulans. Polisi yang baru datang pada pukul 11 malam pada hari jumat digambarkan dengan perlengkapan seperti rompi anti peluru dan kendaraan tempur (*Le Monde*, 2015). Kedua, Pada jam 1 siang tanggal 14 November 2015, penggambaran penderitaan masyarakat ditayangkan melalui video yang beredar di *Le Monde* dengan judul “Blood Everywhere, Corpses in Bataclan” dengan Bahasa Perancis. Isinya adalah keterangan saksi di tempat kejadian perkara. Salah satu korban yang diwawancarai yaitu Benoit mengungkapkan “I thought a speaker had exploded, then the lights went on. The shooters I saw had their faces hidden by hoods and scarves”. Saksi lainnya yang diwawancarai menganggap letusan bom tersebut adalah petasan. Dia juga menambahkan ini adalah peperangan yang sebenarnya (*Le Monde*, 2015)

Selain mengungkap fakta mengenai pernyataan dari orang yang berkepentingan di Perancis dan masyarakat sendiri yang menjadi korban, kali ini penulis mengamati berita yang dipublikasikan satu minggu setelah kejadian, yaitu kebijakan dan tindakan pemerintah Perancis bahkan

Uni Eropa dalam menghadapi masalah yang timbul pada 13 November 2015 ini, beberapa hal yang diberitakan antara lain: Pertama, pada tanggal 19 November 2015 atau dengan kata lain satu minggu setelah kejadian, petugas *Aéroports de Paris* atau petugas bandara bekerja sama dengan detektif, kepolisian dalam meningkatkan keamanan di bandara, bentuk peningkatan keamanannya adalah 250 titik kontrol dan penjagaan, serta 150 mesin pendeteksi bom dipersiapkan jika ada penumpang yang datang ke Perancis, *Le Monde* menambahkan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya akan diperbesar menjadi 650 juta Euro di masa depan untuk peningkatan keamanan antara tahun 2016 hingga 2020. Kedua, menerapkan *Passenger Name Record*. Proyek ini adalah untuk mengidentifikasi semua penumpang yang terbang di Eropa untuk di rekam jejak dimana saja mereka terbang. Data ini disimpan selama lima tahun (*Le Monde*, 2015)

Contoh-contoh berita yang ditunjukkan penulis dari pemberitaan *Le Monde* yang membuktikan bahwa stasiun media ini ikut campur dalam musibah yang terjadi di Paris. Selain itu, *Le Monde* sebagai media massa yang paling banyak dibaca oleh masyarakat Perancis dengan 400.000 pembaca setiap harinya juga cerdas dalam merebut hati masyarakat, baik masyarakat lokal maupun internasional. *Le Monde* menyajikan berita secara lengkap dan berkala, mulai dari pejabat tinggi negara yang melakukan konferensi pers, penderitaan masyarakat hingga kebijakan terdekat yang harus diambil pemerintah bertujuan untuk membuat masyarakat merasa bahwa Perancis telah aman. *Le Monde* menunjukkan fakta yang terjadi di tempat kejadian dan menyajikan berita dengan sangat objektif, hal ini yang dimaksud penulis mampu menenangkan masyarakat setelah ketakutan akan teror berlangsung.

Liberation

Dalam peliputan serangan Paris pada tanggal 13 November 2015, *Liberation* muncul dengan sudut pandang yang berbeda pada awal berita di hari kejadian, *Liberation* muncul dengan tajuk “Attaques à Paris: ce que l'on sait” atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Apa yang Kita Ketahui Mengenai Serangan Paris”. Berbeda dengan *Le Monde* yang memunculkan pemimpin negara yang turut berduka cita dan menyampaikan kebijakannya, dan tentunya lebih cepat dari *Le Monde* yang baru mempublikasikan beritanya pada tanggal 14 November 2015 dini hari. Gaya pemberitaan *Liberation* yang mencampurkan kartun dengan kejadian yang terjadi, serta yang berbeda adalah bagaimana *Liberation* mengemas pemberitaan mengenai *Paris Attack* dengan Psikiatris, Psikolog yang tentunya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan media massa yang lain. Namun sebagai media yang mempunyai pembaca yang cukup banyak di Perancis dan salah satu media massa yang cukup berpengaruh di Perancis, *Liberation* menyajikan kejadian secara lengkap, mulai dari jumlah korban yang berjatuhan hingga strategi Pemerintah yang harus dilakukan. Beberapa hal yang penulis rangkum mengenai pemberitaan *Liberation* dalam *Paris Attack* ini adalah: Pertama, Pada tanggal 13 November 2015 *Liberation* melaporkan serangan Paris yang menewaskan setidaknya 120 korban jiwa, dan negara dalam keadaan darurat. Jurnalis *Liberation* yang bertugas pada saat kejadian tersebut terjadi, Le Carillon melaporkan bahwa tembakan juga terjadi sekitar lima hingga enam kali (*Liberation*, 2015)

Kedua, pada tanggal 14 November 2015 pukul 07.00, Presiden Francois Hollande mengumumkan keadaan darurat dan pengetatan batas negara, serta menyatakan bahwa Pemerintah Perancis telah mengetahui darimana asal serangan serta siapa saja yang menjadi aktor dibalik pengeboman tersebut, Presiden Francois Hollande

menyatakan bahwa serangan dari Teroris merupakan kejadian yang pertama kali terjadi di Paris, dan masyarakat Perancis harus bersamasama meningkatkan kewaspadaan apabila ada serangan lanjutan. Ketiga, menurut Menteri Luar Negeri Perancis, tidak ada perubahan jadwal, perubahan lokasi dan pembatalan terkait Conference of the Parties (COP21). Konferensi internasional yang diselenggarakan mulai tanggal 30 November hingga 11 Desember ini tetap diselenggarakan di Perancis, hanya saja penjagaan konferensi ini akan diperketat, total 7000 delegasi negara, 10000 peneliti lingkungan dan 3000 jurnalis akan hadir dengan penjagaan sekitar 40000 personil keamanan (*Liberation*, 2015)

Keempat, *Liberation* mewawancarai Marc Sageman, dia adalah seorang psikolog terorisme dan mantan agen CIA menjelaskan bahwa apa yang dilakukan teroris yang menyerang Perancis didasari sifat psikopat atau gila, mereka mempunyai ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi menurut Marc Sageman ini adalah mereka membela Ummah atau kaum Muslim. Mereka tidak hanya menyerang Bashar Al-Assad, mereka melindungi negaranya, melindungi komunitas. Mereka merasa seperti tentara yang diutus negaranya untuk tanah air mereka, kelompok terorisme ini bangga menjadi bagian dari Jihad Internasional. Kelima, laporan surat kabar *Liberation* mewawancarai salah satu guru di Paris yang telah mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para siswa pada keesokan harinya ketika siswa masuk sekolah. Tindakan ini dilakukan agar siswa tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Disamping itu, psikologis juga telah dipersiapkan untuk mengurangi efek trauma akibat serangan teror di Paris tersebut (*Liberation*, 2015).

Le Figaro

Le Figaro dan *Le Monde* mempunyai reputasi yang baik sebagai media massa

di Perancis, jika pada akhirnya *Le Monde* tidak mengungkap siapa pelaku pemboman pada tanggal 13 November dan aksi apa yang dilakukan serta seberapa parah efek yang ditimbulkan pasca ledakan tersebut untuk menghindari efek “menang” dari teroris penyerang Bataclan dan Stade de France tersebut walaupun pada awalnya semua diungkap seperti penjelasan penulis di atas, namun *Le Figaro* tidak mengambil langkah demikian, dari berita yang didapatkan penulis melalui situs *lefigaro.fr*, surat kabar ini menjelaskan secara lengkap hingga akhir (*Le Figaro*, 2015).

Beberapa berita yang menyangkut *Paris Attack* 13 November 2015 adalah: Pertama, pada tanggal 14 November pukul 10 pagi waktu setempat, *Le Figaro* menerbitkan berita yang berjudul “Attack in Paris: how to get safe?”. Berita ini berisi tentang rekomendasi dari badan kepolisian setempat bahwa masyarakat dihimbau tidak keluar dari rumah selama proses penyidikan masih berlangsung, rekomendasi ini disampaikan melalui Twitter dengan hashtag #PorteOuvree. Himbuan lainnya adalah jangan takut untuk membuka pintu bagi mereka yang mencari perlindungan. Kedua, reporter *Le Figaro*, Lucile Quillet pada 14 November 2015 mewawancarai Violaine Patricia Galbert, seorang psikolog. Dia menyatakan bahwa malam sebelum kejadian tersebut berlangsung adalah malam yang gembira, masyarakat larut dalam pesta dan kebersamaan yang begitu erat, namun hal tersebut berubah ketika teroris tersebut menyerang, *Le Figaro* juga menggambarkan bahwa setelah kejadian tersebut berlangsung, masyarakat akan sulit kembali ke kehidupan normal, kecemasan mereka akan berkepanjangan dan ketakutan akan menghantui (*Le Figaro*, 2015).

Kecemasan dan ketakutan itu akan membuat mereka berfikir jika ingin meninggalkan rumah, menaiki transportasi umum sendirian dan pergi ke tempat hiburan malam. Violaine Patricia Galbert menyatakan bahwa

ketakutan masyarakat adalah hal yang wajar, karena masyarakat harus melewati drama yang begitu mengerikan sehingga bukan fisik mereka saja yang dibuat mati, namun perasaan mereka juga mati, masyarakat akan mustahil untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah teror tersebut berlangsung. Ketiga, *Le Figaro* meliput beberapa reporter internasional yang sedang bertugas di lokasi tempat kejadian teror di Bataclan dan Stade de France, berita ini dipublikasikan pada tanggal 16 November 2015, melaporkan bahwa reporter *BBC* Graham Satchell tidak bisa menyelesaikan liputan dan tidak kuasa menahan tangis karena merasakan apa yang dirasakan korban pada malam hari tersebut (*Le Figaro*, 2015)

Keempat, beberapa monumen diantaranya di gedung World Trade Center, San Fransisco City Hall dan CN Tower di Toronto setelah peristiwa teror tersebut mengungkapkan bela sungkawanya dengan menyalakan lampu dengan aksen warna bendera negara Perancis. Ini adalah ungkapan bela sungkawa untuk korban teror dan juga bentuk solidaritas kepada warga Perancis, kejadian ini berlangsung beberapa jam setelah serangan berlangsung. Tidak hanya dalam bentuk lampu berwarna bendera Perancis saja, namun juga lilin dan dukungan juga terus mengalir di beberapa perwakilan diplomatik Perancis (*Le Figaro*, 2015).

Kebijakan dan Tantangan Luar Negeri Serta Keamanan Perancis Pasca *Paris Attack*

Mohamed Belmaaza, analis data dari *Liberation* telah dibahas oleh penulis di bab kedua yang merupakan salah satu media massa yang sangat berpengaruh di Perancis. Belmaaza mengatakan bahwa perbedaan antara hari kerja dan akhir pekan dalam konteks persebaran berita adalah ketika hari kerja, kejadian bisa tertutup dengan rapat. Kembali ke penembakan di kantor majalah *Charlie Hebdo* pada hari Rabu, berita tersebut cepat berlalu karena kebanyakan orang-

orang masih berada di kantor atau di sekolah. Tetapi ketika penyerangan di Paris pada hari Jumat, orang cenderung tinggal di rumah dan melakukan hal tersebut hingga akhir pekan. Ini berarti mereka cenderung untuk duduk di depan televisi, menonton berita (Belmaaza dalam Newsrewired.com, 2015)

Jadi ketika bom Paris 13 November 2015 terjadi, banyak orang menghabiskan malam diantara dua layar, televisi untuk liputan langsung dan *handphone* untuk melihat sosial media. Dalam keadaan panik seperti itu, banyak orang yang akan berpindah dari satu layar ke layar yang lain untuk mengikuti berita yang sedang terjadi. Beberapa lini masa juga tidak ketinggalan untuk selalu memperbarui berita mereka terkait insiden yang terjadi. Koran harian Perancis *Le Monde* memfokuskan kepada apa yang terjadi pada hari jumat tersebut. *Le Monde* juga menambah fasilitas Liveblog yang memudahkan penonton untuk mendapatkan informasi secara langsung ditambah dengan ringkasan dari fakta-fakta yang dikonfirmasi. Selain itu *Le Monde* juga membuat interaksi dengan pembacanya dengan "asking direct question"

Kepanikan yang terjadi akibat pemberitaan media yang selalu memperbaharui beritanya, ditambah banyak masyarakat yang mengkonsumsi kejadian tersebut menghasilkan berita yang cepat menyebar. Persebaran berita yang cepat tersebut akhirnya membuat opini di masyarakat tentang teroris berhubungan dengan imigran atau teroris berhubungan dengan suatu agama tertentu. Presiden Prancis Hollande yang notabene mempunyai banyak pendukung yang kecewa dan banyak lawan yang mengejek akibat kegagalan Perancis dalam memecahkan krisis ekonomi di dalam negeri diminta publik untuk segera memberikan respon dan menuntaskan kekhawatiran

yang sedang terjadi (*Guardians*, 2015). Nicolas Sarkozy, mantan Presiden Perancis dan ketua partai oposisi konservatif Les Républicains melalui *the Guardians* mengatakan bahwa Perancis harus membuat perubahan besar terkait kebijakan luar negeri dan keamanan. Kebijakan Prancis Hollande di Suriah menjadi pusat perdebatan. Perancis menjadi yang pertama melepaskan kerjasamanya dengan Suriah pada tahun 2012, yang berarti sedang "berperang" dengan pemerintah Bashar al-Assad. Semenjak itu Suriah menjadi negara yang terpinggirkan dan muncul kekuatan kelompok-kelompok jihad yang termasuk di dalamnya adalah negara Islam, yang bertanggung jawab terhadap serangan Paris (*Guardians*, 2015)

Persebaran berita yang cepat tersebut akhirnya membuat opini di masyarakat tentang teroris berhubungan dengan imigran atau teroris berhubungan dengan suatu agama tertentu.

Berbeda aktifitas yang dilakukan teroris, berbeda juga aktivitas media terhadap peliputannya, hal ini diungkapkan oleh Atran (2004) yang mengatakan bahwa bom bunuh diri menerima liputan media yang signifikan dan Atran juga percaya bahwa hal tersebut bisa

meningkatkan popularitas di kalangan kelompok-kelompok teroris. Peliputan yang kurang signifikan bisa ditemukan khusus pada serangan yang berada di negara-negara jauh dari Amerika Serikat. Atran menyimpulkan bahwa perhatian media terhadap suatu kasus terorisme diprediksi menjadi dua hal, yang pertama adalah kemungkinan serangan lain di negara yang terkena dalam waktu tujuh hari dan interval hingga serangan berikutnya.

Pada kenyataannya, teroris yang sering menyerang negara-negara maju dikarenakan beberapa faktor: Pertama, mereka mendapat akses berita yang luar, baik media cetak maupun media sosial. Dengan begitu pesan yang ingin mereka sampaikan akan tersampaikan dengan cepat. Kedua, teroris ingin menebar ketakutan, dengan begitu

masyarakat tahu bahwa teroris memang ada dan menebar ancaman. Ketiga, teroris ingin merekrut orang-orang baru, dengan adanya pemberitaan media yang besar di negara maju, mereka menebar misi perekrutan terhadap orang-orang baru yang banyak dari mereka sudah tidak punya pekerjaan dan ekonomi yang rendah, dengan kata-kata menarik jihad bunuh diri menuju surga (Chassany, 2015).

Data dari Eurostat menyebutkan bahwa media berpengaruh dalam perumusan kebijakan pemerintah Perancis meskipun bukan merupakan faktor utama. Kebijakan dari Francois Hollande bersama partai, baik pendukung dan oposisi bersama-sama merumuskan kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat pada umumnya. Menurut Eurostat, penambahan *Liveblog* di dalam website miliknya mempengaruhi Pemerintah untuk merencanakan kebijakan setelah kejadian (Eurostat, 2015).

Serangan Paris 2015 telah membangkitkan wacana publik Perancis sudah memasuki zona perang melawan terorisme. Di sebuah negara dengan tradisi sosial yang kuat, dan politik (baik di sayap kanan maupun sayap kiri) dan masyarakat telah menerima wacana perang tersebut. Ini adalah hal yang baru untuk masyarakat Perancis yang telah dewasa dan tidak ada pengalaman di Perang Dunia II serta konflik kolonial pada tahun 1950-an dan 1960-an. Perbedaan Perancis dengan negara lainnya adalah ketika politisi di Perancis menggunakan kata Perang di media sehubungan dengan aksi melawan terorisme.

Fakta tersebut segera membuka perdebatan kontroversial di antara masyarakat Perancis. Para penstudi dan intelektual yang berpengaruh di Perancis tidak setuju dengan alasan yang menyebabkan warga negara Perancis yang masih muda menjadi teroris dan melakukan bom bunuh diri. Gilles Kepel (2015), seorang ahli Timur Tengah mengatakan bahwa akar

radikalisme tersebut adalah kehadiran aliran Salafism di antara penduduk Muslim Perancis, yang mendorong warga Perancis untuk melakukan tindakan terorisme dan bom bunuh diri. Penstudi Timur Tengah lainnya, Oliver Roy menolak untuk mengaitkan Salafism dengan aksi yang dilakukan pada tanggal 13 November 2015. Roy mengatakan bahwa Islam hanya instrumen yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendukung aksi radikal yang berimbas pada citra Islam terhadap kehidupan sosial. Roy juga mengamati bahwa sebagian besar teroris dalam serangan tahun 2015 memiliki pengetahuan yang lemah terhadap Al Qur'an, Roy menambahkan bahwa lebih baik penstudi lebih cocok untuk meneliti kenakalan remaja di pinggiran kota yang menyebabkan masalah sosial yang akan menjurus ke tindakan radikalisme (Roy, 2010).

Setelah serangan November, pemerintah Perancis menerapkan "State of Urgency" di seluruh wilayah. Hukum Uni Eropa mengenai "state of urgency" pada tahun 1955 mengatakan bahwa aparat keamanan di negara yang bersangkutan (polisi dan tentara) berhak untuk mencurigai dan berhak menyidik siapapun yang dicurigai berkaitan dengan aksi terorisme (Cheurfa, 2016). Perdana Menteri Manuel Valls mengumumkan kepada publik pada November 2015 bahwa Perancis sudah mengatasi perang yang diikrarkan oleh teroris dengan melaksanakan pengamanan di lokasi yang sensitif (bandara, stasiun dan tempat-tempat wisata di Paris). Pengamanan ini diperkuat setelah mendapat persetujuan dari publik dan menghindari serangan lanjutan dari teroris serta untuk menghindari trauma terhadap serangan pertama pada Januari 2015 dan serangan kedua pada November 2015. Selain mengatakan bahwa Perancis sedang dalam keadaan perang, Presiden Francois Hollande juga mengatakan akan mengubah konstitusi untuk melawan tipe terbaru dari perang dan menciptakan 5000 pekerjaan Polisi dan

Tentara baru dalam jangka waktu dua tahun (*Liberation*, 2015).

Setelah dua serangan Paris, masyarakat Perancis semakin waspada dengan terorisme, perang dan radikalisme Muslim. Aksi yang dilakukan teroris sangat erat hubungannya dengan Islam, akhirnya memunculkan kembali perdebatan antara masyarakat Muslim di dalam negara. Ini disebabkan karena Perancis merupakan negara sekuler dimana agama tidak mempunyai tempat dalam negara atau dengan kata lain dikesampingkan. Diperkuat dengan adanya undang-undang Perancis yang dibentuk pada maret 2004 yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan simbol keagamaan dalam bentuk apapun di sekolah. Situasi tersebut sangat bertentangan dengan mahasiswi dan siswi muslim yang ingin menggunakan penutup kepala. Di tahun 2010, hukum Perancis menambahkan masyarakat Perancis dilarang menggunakan cadar (niqab) di ruang publik. Sebagian besar penduduk Perancis mendukung undang-undang ini sebagai tindakan pencegahan dan peredaan trauma pasca kejadian 13 November 2015 (Bertossi, 2016). *National Front Party*, partai yang dipimpin oleh Le Pen menggunakan topik terorisme, perang dan radikalisme Muslim untuk kepentingan politik dan meraih suara bagi partai. Pemerintah Perancis baik sayap kiri maupun sayap kanan dianggap telah bertoleransi dengan nilai-nilai kaum Muslim. Le Pen menganggap kaum Muslim sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan Perancis dan sangat berpotensi menjadi teroris. Pasca kejadian teror tersebut, banyak yang mendukung *National Front Party*. Kekuatan media menjadi salah satu faktor terkuat suara masyarakat terkumpul untuk segera mendesak pemerintah memberhentikan imigrasi dan memperketat peraturan perbatasan wilayah (Liang, 2007).

Menurut jajak pendapat, 15-25 persen dari pemilih Perancis dalam pemilu dipersiapkan untuk mendukung

program dari partai Front National. Walaupun pemilih partai kanan didominasi oleh kaum menengah kebawah (kaum buruh dan karyawan tidak tetap). Marine Le Pen menjadi kandidat dalam pemilihan Presiden Perancis pada bulan Mei 2017 dan berjuang hingga putaran kedua sebelum dikalahkan Macron. Kebijakan yang dicanangkan adalah mengakhiri kebijakan imigrasi, memperkuat perang melawan terorisme dan pemulihan kesejahteraan negara. Ketiga fokus itu akan menjadi "senjata" Partai Front Nasional untuk maju ke putaran pemilihan presiden 2017 (Crepon et al, 2015). Keyakinan antar penduduk Perancis serta media yang kuat mendorong pemerintah untuk menguatkan keamanan dan pengawasan perbatasan. Semenjak kejadian November 2015 ini, Perancis mengubah prinsip perbatasan dan pergerakan bebas yang didukung oleh elit politik dan media serta masyarakat sebagai elemen yang penting dari modernitas dan emansipasi.

Sejak 1952, Perancis menjadi aktor penting di dalam Uni Eropa bekerja sama dengan Jerman dalam rangka membuka pintu perbatasan, dimana hal tersebut diatur dalam perjanjian Brussels. Kepercayaan tersebut menurun setelah referendum negatif pada Mei 2005 dimana hal referendum tersebut menolak perjanjian konstitusi Uni Eropa. Serangan teror pada tahun 2015 telah membawa ketidakpercayaan baru di masyarakat, Perancis dijadikan contoh proyek politik liberal yang mendasari penghapusan kebijakan perbatasan dan pergerakan bebas masyarakat antar negara Eropa (Lequesne, 2008). Setelah kejadian serangan Paris pada bulan November 2015, Presiden Hollande juga mengeluarkan pernyataan tentang artikel 42(7) pada perjanjian Uni Eropa yang tidak pernah digunakan oleh member lain di Uni Eropa yang berisi:

If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an

obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter.

Sejalan dengan artikel 42(7) tersebut, pasal 222 perjanjian yang telah ditetapkan di Uni Eropa yang berisi negara anggota akan bertindak bersama-sama dalam semangat solidaritas jika negara anggota menjadi objek serangan teror, atau bahkan Pasal 5 *North Atlantic Treaty* yang digunakan setelah serangan 9/11. Namun ada yang berbeda antara artikel 42(7) dengan pasal 222 Uni Eropa. Pertama, artikel 42(7) adalah murni antar pemerintah dalam hal ini adalah negara di dalam negara Uni Eropa, pasal 222 memerlukan keputusan lembaga Eropa. Dalam hal *Paris Attack* 13 November 2015. Kedua, artikel 42 (7) mengacu pada agresi bersenjata, cara bagi pemerintah Perancis untuk para negara anggota EU menuju operasi militer eksternal seperti di Mali, Suriah, dan Iraq. Namun pada kenyataannya Perancis merasa anggota Uni Eropa (Kecuali Inggris) tidak berkomitmen untuk menyerang sumber-sumber terorisme tersebut.

Pemerintah Perancis memutuskan kejadian November 2015 sebagai cara untuk memperkenalkan bagaimana Negara mengontrol perbatasannya kepada negara-negara Uni Eropa yang menggunakan Schengen, pembenaran mengenai ancaman bagi ketertiban dan keamanan negara, Negara dapat memberikan perpanjangan kontrol perbatasan hingga dua tahun jika negara merasa kesulitan untuk mengontrol perbatasan eksternal. Perancis berbatasan dengan negara anggota Schengen yang lain seperti: Belgia, Jerman, Italia, Luksemburg, Spanyol dan Swiss. Dalam prakteknya kontrol perbatasan tersebut dirasa mustahil bagi pemerintah Perancis, karena titik perbatasan yang terlampau banyak dan jumlah penjagaan yang tidak memadai serta biaya yang terlalu tinggi apabila kebijakan tersebut dipraktekkan. Sebagai gantinya, Pemerintah Perancis menerapkan setengah dari kontrol

perbatasan. Kontrol ini dilakukan secara acak, kebanyakan di titik-titik perbatasan yang paling sensitif. Sebagai contoh adalah Wisatawan dari Brusels yang akan ke Paris dengan menggunakan kereta api akan diminta untuk menunjukkan kartu identitas seperti Paspor dan Visa. Penegakkan kembali kontrol perbatasan ini disebabkan karena: Pertama, serangan pada tanggal 13 November 2015 merupakan serangan yang direncanakan di Belgia, bukti menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dari Brussels ke Paris. Kedua, karena kebingungan masyarakat yang tidak bisa membedakan hubungan terorisme dan imigrasi, masyarakat dengan didorong oleh media menyamakan hubungan antara pengaruh banyaknya imigran dan terancamnya keamanan nasional, hal tersebut yang ingin diklarifikasi oleh pemerintah.

Pada Juni 2011, pemerintah Perancis telah memperbaiki perbatasan antara Perancis-Italia untuk mengontrol arus imigran yang datang dari Libya dan Italia Selatan. Tetapi hal tersebut akan memberi dampak pada sisi ekonomi, diantaranya adalah akhir Schengen bisa menghabiskan biaya dalam jangka panjang sebanyak sepuluh miliar Euro per tahun untuk Perancis, hilangnya 5.000-10.000 pekerjaan lintas perbatasan dan menurunnya PDB sebanyak 0.5 persen pada tahun 2025 (Aussilloux, 2016). Usulan pemerintah Belanda pada November 2015 tentang pembentukan mini Schengen dengan sejumlah negara itu tidak diterima dengan baik oleh pemerintah Perancis (*Le Figaro*, 2015). Walaupun beberapa mantan elit politik di Perancis mengusulkan untuk menyetujui perjanjian baru Schengen seperti mantan Presiden Nicholas Sarkozy mengusulkan "Schengen 2" dengan institusi-institusi baru dan aturan baru yang berisi negara non Uni Eropa tidak boleh melakukan perjalanan antar negara-negara Schengen (Schengen est mort, 2016). Uni Eropa dianggap sebagai kegagalan karena Perancis

menampung jumlah pengungsi terberat daripada negara-negara lainnya. Front National Party menggunakan masalah ini untuk meningkatkan Euroskeptis. Akhirnya, serangan teroris yang mendorong pemerintah Perancis untuk mendukung PNR (Passenger Name Record) seperti yang dijelaskan penulis pada bab dua mengenai media. Pada tanggal 23 November 2015, Perdana Menteri Perancis Manuel Valls pergi ke parlemen Uni Eropa untuk mendukung kebijakan PNR. Ia meminta Partai Sosialis untuk mendukung, namun Partai Sosialis khawatir jika kebijakan PNR ada, maka konsekuensinya adalah masyarakat terenggut hak-hak individunya (Les Echos, 2016).

Serangan teroris 13 November 2015 telah memberikan dampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat Perancis yang telah menjadi bagian dari Uni Eropa sejak awal. Masalah keamanan adalah salah satu penyebab masyarakat Perancis mendukung adanya kebijakan-kebijakan seperti PNR. Perlindungan pemerintah dan kontrol perbatasan yang harus diperkuat adalah solusi yang harus dipenuhi agar masyarakat tidak lagi trauma atas kejadian yang menimpa selama dua kali setahun. Namun di sisi lain arus imigran yang terlalu banyak juga mau tidak mau membuat Pemerintah Perancis membuka perbatasan, karena berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Derasnya arus pengungsi terutama dari Syria dan Iraq yang didasarkan kepada keamanan negara mereka yang tidak stabil, memaksa pengungsi mencari suaka untuk memulai hidup baru yang lebih baik di masa depan (Lequesne, 2016).

Kesimpulan

Paris Attack 13 November 2015 menjadi titik balik perubahan kebijakan pemerintah Perancis sebagai cara untuk

pengecahan serangan lanjutan. Media disini menempatkan posisinya ketika masa krisis untuk memberitakan segala hal yang berkaitan dengan kejadian hingga selesai. Pada akhirnya, publik sangat bergantung pada apa yang diberitakan oleh media massa, gaya pembahasan juga masuk dalam tindakan publik untuk membuat opini baru tentang suatu kasus. Karena media merupakan institusi yang memiliki cukup instrumen untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi secara cepat, terutama di era digital seperti sekarang. Sejak terjadinya bom Paris, simpati masyarakat lokal dan internasional berdatangan tanpa henti. Karena bom tersebut terjadi berdekatan dengan acara-acara penting seperti UN Climate Talks dan Euro 2016.

Media-media yang berpengaruh di Perancis seperti yang dibahas penulis yaitu *Le Monde*, *Liberation*, dan *Le Figaro* mempunyai tugas untuk menyebarkan berita secara masif dan menjadi referensi media internasional untuk mengabarkan berita yang lebih lengkap. Hal ini terbukti melalui *CNN Theory* seperti yang dijelaskan penulis pada bab pertama, mengatakan bahwa media mempengaruhi opini publik dengan 3 efek, *CNN Effect* menimbulkan gambar yang memaksa pemerintah untuk ikut campur. *Bodybag Effect* menimbulkan kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh banyak korban yang tewas maupun luka di tempat kejadian perkara, itulah yang menjadi lahan yang menarik bagi media untuk meningkatkan minat baca dan membuat opini di masyarakat tentang kejadian tersebut. *Bullying Effect* menimbulkan efek masyarakat yang ingin mengetahui secara langsung bagaimana terjadinya *Paris Attack* 2015 (Nacos, 2007;20).

Pada akhirnya, publik sangat bergantung pada apa yang diberitakan oleh media massa, gaya pembahasan juga masuk dalam tindakan publik untuk membuat opini baru tentang suatu kasus.

Kebijakan Perancis yang berubah yaitu berupa peningkatan kontrol perbatasan, penurunan jumlah imigran yang diperbolehkan masuk dan mempertanyakan lagi sistem Schengen yang telah dipakai dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, politisi dan masyarakat sepakat untuk menerima wacana perang ini sebagai perang teritorial baru, walaupun musuh yang dihadapi masih belum jelas. Disamping itu pengetahuan terorisme mengenai jihad dan agamanya yang masih dirasa kurang menyebabkan aksi bom bunuh diri tersebut terjadi. Kedua, partai nasionalis yang dipimpin oleh Le Pen menggunakan topik terorisme untuk menunjang suara pemilih bagi Partai. Partai nasional sebelumnya yang sangat bertoleransi dengan nilai-nilai kaum Muslim sekarang bertolak belakang dan menganggap kaum Muslim bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan Perancis. Dua faktor di awal ini merupakan *policy influencer* dalam kebijakan Pemerintah Perancis.

Ketiga, berkurangnya kepercayaan masyarakat Perancis terhadap Uni Eropa, hal ini disebabkan tidak lain karena teroris yang melancarkan aksinya di Paris merupakan imigran yang berasal dari Brussels. Hal ini menyebabkan Perancis mengajarkan cara terbaru untuk mengontrol perbatasan kepada negara-negara di Uni Eropa yang menggunakan Schengen. Perpanjangan kontrol perbatasan dirasa solusi untuk menghindari serangan lanjutan. Selanjutnya pemerintah Perancis menetapkan PNR (Passenger Name Record) sebagai solusi untuk mengontrol daerah vital seperti bandara, stasiun dan tempat wisata. Keempat, kedekatan Perancis dengan Militer Amerika sebagai tindakan pencegahan serangan lanjutan, kedekatan ini berupa keputusan luar negeri Perancis yang ikut campur dalam urusan Amerika Serikat di

Afghanistan, Libya dan Mali sebagai kontribusi positif demi pengamanan negara dari Muslim radikal. Serangan udara terhadap rezim Suriah setelah PBB membuktikan bahwa Bashar Al-Assad menggunakan senjata kimia di Damaskus juga menjadi kontribusi positif. Namun pada akhirnya Perancis tidak menyerang hingga hancur semua karena intervensi militer di luar negeri membutuhkan sumber daya yang banyak, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Faktor ketiga dan keempat merupakan faktor penting terkait kebijakan luar negeri Perancis. Kelima, perubahan kebijakan yang ditimbulkan oleh opini masyarakat hasil dari media telah menunjukkan perubahan signifikan dalam penurunan daftar permohonan imigran yang masuk ke wilayah Perancis berdasarkan data pada bab kedua dan bab ketiga.

Dalam terbuhtinya hipotesis penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas dalam menganalisis permasalahan penelitian ini. Karena itu dapat dikatakan pula bahwa teori *CNN Effect* yang mempengaruhi opini publik, teori kebijakan publik sebagai dasar apa saja yang mempengaruhi berubahnya kebijakan suatu negara, serta teori perubahan kebijakan sebagai pengubah antara opini publik, suara partai dan *policy maker* menjadi kebijakan pemerintah Perancis. Dalam kasus ini, media berperan aktif dalam pemberitaan mengenai kejadian, membentuk opini publik dan menyampaikannya kepada pemerintah. Penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya penelitian yang lebih detil dan lebih lanjut terkait *Paris Attack* dengan variabel lembaga pemerintah dan partai politik yang turut merubah kebijakan Perancis.

Daftar Pustaka

- [1] Atran, S. (2006). The moral logic and growth of suicide terrorism. *Washington Quarterly* 29 (2), 127–147.
- [2] Aussiloux, Vincent and Boris LeHir, 'Les conséquences économiques d'un abandon des accords de Schengen', *La Note d'Analyse, France Stratégie*, 39, February 2016.

- [3] Badie, Bertrand (2016). *Nous ne sommes plus seuls au monde. Un autre regard sur l'ordre international* (Paris: La Découverte)
- [4] Baker, J., III (1995). *The politics of diplomacy*. New York: G. P. Putnam's Sons.
- [5] Behm, A.I. Q. (1991). 'Terrorism: Violence Against the Public and the Media: The Australian Approach.' *Political Communication and*
- [6] Bertossi, Christophe (2016). *La laïcité à la française: valeurs et réalités* (Paris: Presses du CNRS)
- [7] Bozo, Frédéric (2013). *Histoire secrète de la crise iranienne: La France, les Etats-Unis et l'Irak 1991-2003* (Paris: Perrin, 2013).
- [8] Cerny, Philip G (1980). *The Politics of Grandeur: Ideological Aspects of De Gaulle's Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
- [9] Charillon, Frédéric (2015). 'Dire les relations internationales en France', *Revue Internationale et Stratégique*, Vol. 99, No. 3. pp.73-99
- [10] Cheurfa, Madani (2016). *L'état d'urgence modifie-t-il la confiance des Français?* (Paris: Sciences Po, CEVIPOF)
- [11] Coplin, William D (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, terj. Marsedes Marbun, Edisi Kedua (Bandung: Sinar Baru), hal 37-42
- [12] Crepon, Sylvain (2015). *Alexandre Dézé and Nonna Mayer, Les faux-semblants du Front National* (Paris: Presses de Sciences Po)
- [13] Desportes, Vincent (2015). *La dernière bataille de France. Lettre aux Français qui croient encore être défendus* (Paris: Gallimard)
- [14] Erforth, Benedikt (2015). *Thinking Security: A Reflectivist Approach to France's Security Policy-Making in sub-Saharan Africa*, PhD dissertation
- [15] Freedman, L. (2000). *Victims and victors: Reflections on the Kosovo war*. *Review of International Studies*, 26, 335-358
- [16] Ganor, Boaz. (2002). 'Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?' *Media Asia Communication Quarterly*. Vol 20 No. 3. hal. 123-133.
- [17] Giessmann, Hans I. (2002). 'Media and the Public Sphere: Catalyst and Multiplier of Terrorism?' *Media Asia Communication Quarterly*. Vol 20 No. 3. hal. 134-136.
- [18] Gilboa, E. (2002a). *The global news networks and U.S. policymaking in defense and foreign affairs*. Cambridge, MA: Shorenstein Center on the Press, Politics, and Public Policy, Kennedy School of Government, Harvard University.
- [19] Graber, Doris (2000) *Mass Media and American Politics*. (Washington, D.C: CQ Press)
- [20] Greenhouse, Emily (2015). "Life and Death on the Boulevard Voltaire". *The New Republic*.
- [21] Hellmuth, Dorle (2015), 'Countering Jihadist Terrorists and Radicals: The French Way', *Studies in Conflict and Terrorism*, Vol. 38, No.12. pp.979-97.
- [22] Henrikson, Alan K. (1980). 'The Geographical "Mental Maps" of American Foreign Policy Makers', *Politics and Geography*, Vol. 1, No. 4, pp.495-530.
- [23] Hoge, J. F., Jr. (1994). *Media pervasiveness*. *Foreign Affairs*, 73, 136-144
- [24] Hopkinson, N. (1993). *The media and international affairs after the Cold War* (Wilton Park Paper 74). London: Her Majesty's Stationery Office
- [25] Ibrahim, Idi Subandy (ed.). (2005). "Media dan Citra Muslim: dari Spiritualitas untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog". Yogyakarta: Jalasutra.
- [26] J. Curan & M. Gurenvitch dalam *Mass Media and Society* (eds). 1991
- [27] Jenkins, Michael (1980). *The Study of Terrorism: Definitional Problem*. (Santa Monica: The Rand Corporation). Hal 3
- [28] Kepel, Gilles & Antonie Jardin (2015). *Terreur dans l'Hexagone: Genèse du Jihad français* (Paris: Gallimard)
- [29] Kushner, Tony and Katharine Know (1999) *Refugees in an Age of Genocide: Global, National, and Local Perspectives During the Twentieth Century* (New York: Routledge). 408.
- [30] Lequesne, Christian. *Ethnographie du Quai d'Orsay. Les pratiques des diplomates français* (Paris: Presses du CNRS, forthcoming).
- [31] Lequesne, Christian (2016): *French foreign and security challenges after the Paris terrorist attacks*, *Contemporary Security Policy*.
- [32] Lequesne, Christian (2016), 'The Eurozone Crisis and European Integration', in Sabine Saurugger and Fabien Terpan (eds), *Crisis and International Change in Regional Integration* (Abingdon: Routledge, pp.41-59).
- [33] Liang, Cristina. S (2007). *Europe for Europeans: The Foreign and Security Policy of the Popular Radical Right* (Aldershot: Ashgate)
- [34] McNair, Brian. (1999). *An Introduction to Political Communication*, ed. 1st, London: Routledge.
- [35] McNulty, T. (1993). *Television's impact on executive decisionmaking and diplomacy*. *Fletcher Forum of World Affairs*, 17, 67-83.
- [36] McQuail (1987). Denis. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, terj Agus Dharma & Amimuddin Ram (Jakarta; Erlangga) hal 3-51
- [37] Minear, L., Scott, C., & Weiss, T. (1996). *The news media, civil war, and humanitarian action*. Boulder, CO: Lynne Ripener.
- [38] Nacos, Brigitte L. (2007). *Mass Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counter terrorism*, 2nd Edition (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, 2007), p.20.
- [39] Naveh, Chanan. (2002). "The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework". *Dalam Conflict and Communication Online*, Vol. 2, No. 1.
- [40] Nicoullaud, François (2016). 'Voyage dans la diplomatie nucléaire de l'Iran' in Paul

- Dahan (ed.), *Diplomates. Dans le secret de la négociation* (Paris: Presses du CNRS). pp.101–38.
- [41] Ollivier, Helena. 2007. *Opini Publik*. Jakarta: PT. Indeks.
- [42] Persuasion. Vol 8. hal. 233-246.
- [43] Peters, Dirk and Wolfgang Wagner (2014). 'Executive Privilege or Parliamentary Proviso? Exploring the Sources of Parliamentary War Powers', *Armed Forces and Society*, Vol. 40, No. 2. pp.310–31.
- [44] Rosati, Jerel A (2004) *The Politics of United States Foreign Policy*. (Belmont: Wadsworth). hal. 546-547
- [45] Roy, Olivier. *Holy Ignorance* (2010). *When Religion and Culture Part Ways* (London/ New York: Columbia University Press). On the Kepel/Roy controversy, see *Libération*, 14 April 2016.
- [46] Saideman, Stephen M (2016). 'The ambivalent coalition: doing the least one can do against the Islamic state', *Contemporary Security Policy*, Vol. 37, No. 2. forthcoming
- [47] Sastropoetro, Santoso. 1990. *Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Karya.
- [48] Schmid, Alex P. dan Janny de Graaf. (1982). *Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media*. Beverly Hills: Sage Publications.
- [49] Siregar, Ashadi (2006). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 21.
- [50] Sushartami, Wiwik (2007). "Media dan Perjuangan Perempuan Pasca Orde Baru". *Kompas*, hal. 36, dikutip dalam <http://situs.kesepro.info/index/htm>, diakses tanggal 18 September 2016
- Severin, Werner J & Jamesa W Tankard, Jr (t. t). *Teori Komunikasi*, dalam *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, Terapan di Dalam Media Massa*. Hal.128
- [51] Syukron, Agus dan Muh. Bahruddin (2011), "Alumni Pesantren dan Isu Terorisme" dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 8 No. 1 Juni, 33-42.
- [52] Whittemore, H. (1990). *CNN: The inside story*. Boston: Little, Brown.
- [53] CNBC (2015). *Ryan to Ask House to 'Pause' US Refugee Program*, *CNBC*, November 17, 2015: <http://www.cnbc.com/2015/11/16/us-states-to-turn-away-syrian-refugees.html>.
- [54] CNN (2015). *COP21 climate change summit: 'Never have the stakes been so high'* [Online] / auth. Brumfield Ben and Pearson Michael // CNN. - CNN, November 30, 2015. Diakses pada 20 September 2016.
- [55] CNN (2015). *Paris massacre: At least 128 killed in gunfire and blasts, French officials say* [Online] / auth. Almsy Steve, Meilhan Pierre and Bittermann Jim // CNN. - CNN, November 14, 2015. Diakses pada 20 September 2016. - <http://edition.cnn.com/2015/11/13/world/paris-shooting/>.
- [56] CNN/ORC (2015). *Poll: Partisan Split over U.S. Taking Refugees*, *CNN*, September 14, 2015: <http://www.cnn.com/2015/09/14/politics/cnn-poll-migrant-crisis>.
- [57] E-Ir (2016). Mordon, Aurelien dan Aaron Winter (2016), "Islamophobia(s) In the Aftermath of the Nice Attack" (online) dalam <http://www.e-ir.info/2016/07/28/islamophobias-in-the-aftermath-of-the-nice-attack/> - Diakses pada 26 September 2016
- [58] France 24 (2015). *Jihadists 'Mingled' Among Migrants, Hungary PM Says After Paris Attacks*, *France 24*, November 16, 2015: <http://www.france24.com/en/20151116-jihadists-mingled-among-migrants-hungary-pm-says-after-paris-attacks>.
- [59] Independent (2015). *Paris Attacks: President Francois Hollande Welcomes 30,000 Refugees in the Next Two Years*, *Independent*, November 18, 2015: <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-president-francois-hollande-welcomes-30000-refugees-in-next-two-years-a6739221.html>.
- [60] Independent (2015). *We are Monitoring Every Muslim' After Paris Attacks, Claims Slovakian PM*, *Independent*, November 17, 2015: <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/we-are-monitoring-every-muslim-after-paris-attacks-claims-slovakian-pm-a6737851.html>.
- [61] Le point (2015). *Finkielkraut: "Jihad is an obligation bequeathed by Muhammad to all Muslims"*. Melalui http://www.lepoint.fr/societe/finkielkraut-le-djihad-est-une-obligation-leguee-par-mahomet-a-tous-les-musulmans-11-12-2015-1989225_23.php diakses pada 1 Juni 2017
- [62] Les Echos (2000). Jean-Marie Colombani: 'Le Premier ministre doit se saisir du dossier NMPP', *Les Echos*, January 18, 2000, p. 21. (Online) dalam <http://www.referenceforbusiness.com/history/2/10/Le-Monde-S-A.html> Diakses pada 3 Mei 2017
- [63] New York Times (2015). *France Attacks to Dominate Agenda at G-20 Conference in Turkey* [Online] / auth. ShearMichael D. // The New York Times. - The New York Times, November 14, 2015. - 20 September 2016 - http://www.nytimes.com/2015/11/15/us/politics/paris-attacks-to-dominate-agenda-at-g-20-conference-in-turkey.html?_r=0.
- [64] Reuters (2015). *Exclusive: After Paris, Americans Want U.S. to do more to Attack Islamic State – Poll*, *Reuters*, November 16, 2015: <http://www.reuters.com/article/2015/11/16/us-france-shooting-usa-poll-idUSKCN0T528Y20151116#MP2Pq7P33IzbPxYZ.97>.
- [65] Ridho Imawan Hanafi (2007). "Media dan Perilaku Masyarakat", *Jaringan Islam Liberal Online*, 10 April, 2007, diakses dari <http://www.islamlib.com/id/index.php?page=archive&mode=category&id=5>, diakses tanggal 18 September 2016

- [66] RT (2015). Cameron's response to ISIS: £2bn military boost, 2,000 new spies, double drone fleet [Online] / auth. RT // RT Question More. - TV-Novosti, November 17, 2015. - 20 September 2016. - <https://www.rt.com/uk/322373-isis-military-spending-drones/>.
- [67] Sethi, Arjun (2015), "Don't play into hands of terrorists" (Online) dalam <http://www.bbc.com/news/uk-england-london-34995431> Diakses pada 26 September 2016
- [68] Slate (2015). "After Paris Attacks, Poland Says It Will No Longer Participate in EU's Refugee Plan," *Slate*, November 14, 2015: http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2015/11/14/poland_says_it_will_resist_eu_refugee_plan_after_paris_attacks.html.
- [69] The Hill (2015). Cruz to Offer Bill Banning Syrian Refugees," *The Hill*, November 16, 2015: <http://thehill.com/policy/national-security/260317-cruz-to-offer-bill-banning-syrian-refugees>.
- [70] Thibau, Jacques. 1996. *'Le Monde.' Histoire d'un journal. Un journal dans l'Histoire*, Paris: Nouvelle édition, Plon, (Online) dalam <http://www.referenceforbusiness.com/history2/10/Le-Monde-S-A.html> Diakses pada 3 Mei 2017
- [71] Washington Post (2015). Islamic State claims responsibility for Paris attacks [Online] / auth. Sharma Swati // The Washington Post. - The Washington Post, November 14, 2015. - December 20 September 2016- <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/11/14/islamic-state-claims-responsibility-for-paris-attacks/>.
- [72] Washington Post (2015). Were Syrian Refugees Involved in the Paris Attacks? What We Know and Don't Know," *Washington Post*, November 17, 2015: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/11/17/were-syrian-refugees-involved-in-the-paris-attacks-what-we-know-and-dont-know/?postshare=4891447794791531&tid=ss_tw.
- [73] Atlantico (2015), dipublikasikan oleh http://www.ifop.com/media/poll/3282-1-study_file.pdf. Diakses pada 1 Juni 2017
- [74] Eurostat (2015) press release 55/2015. diakses pada 1 Juni 2017
- [75] Immigration (2016). Info resources. Diakses melalui <http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/statistique/tableaux-statistiques/les-demandes-d-asile>. Diakses pada 1 Juni 2017
- [76] Trajkovic, Jonathan (2015), dipublikasikan oleh Tableau Public. <https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/analysis-twitter-hashtags-following-paris-attacks>. Diakses pada 1 Juni 2017
- [77] OJD France (2016). Book 2015-2016 Presse Payante – Grand Publik. Diakses melalui <http://www.ojd.com/books/export/225> pada 1 Juni 2017